

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Pemprov DKI Kembali Terima Fasos/Fasum dari Pengembang di Lima Wilayah Jakarta

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Junianto Hamonangan

[Pemprov DKI Jakarta](#) kembali menerima penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Kemudian, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Ruang (IPPR).

Penyerahan itu dilakukan pihak pengembang di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Para pengembang tersebut berasal dari sektor swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, kegiatan serah terima aset [fasos](#)/fasum ini merupakan kali ketiga pada 2024.

Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud stabilitas sinergi Pemprov DKI Jakarta dengan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

"Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengembang selaku pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memenuhi kewajibannya dan tidak menunda dalam menyerahkan kewajiban. Lalu ketersediaan [fasos](#)-fasum ini merupakan hasil usaha bersama dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Jakarta," jelasnya, Rabu (16/10/2024). Syaefuloh melanjutkan, ia mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terus mendampingi saat melakukan pembahasan dalam rangka penagihan kewajiban [fasos](#)-fasum.

Syaefuloh juga berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang mendampingi keliling wilayah dalam memastikan proses penagihan [fasos](#)-fasum berjalan lancar.

"Kami juga mengapresiasi para wali kota dan bupati yang terus bersemangat di wilayah untuk melakukan penagihan kepada para pengembang dan terima kasih kepada Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) dan Perangkat Daerah yang secara bersama-sama melakukan penagihan kewajiban," tuturnya.

Syaefuloh berharap, penagihan kewajiban yang masih tersisa untuk terus diupayakan agar cepat selesai.

"Kami juga berterimakasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membantu menyelesaikan sertifikasi aset [fasos](#)-fasum," imbuhnya. (m26)